

STRATEGI KAMPANYE POLITIK GOLKAR PADA PEMILIHAN UMUM 1977-1987: DALAM PERSPEKTIF PEMBERITAAN DI SURAT KABAR SUARA KARYA DAN MERDEKA

MARINI AGUSTYNA

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: marini.agust@yahoo.com

Artono

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada umumnya media massa berfungsi sebagai wadah yang menyampaikan informasi dari satu sumber ke sejumlah sasaran. Semua segi kehidupan dapat dijadikan sebagai bahan pemberitaan di media massa, mulai dari politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menjelang pemilihan umum, kampanye menjadi salah satu aktivitas politik yang sering mengisi halaman surat kabar. Pemilu Orde Baru merupakan periode kejayaan Golkar dalam ranah politik Indonesia. Sejumlah kebijakan politik pemerintah memberikan keuntungan bagi kemenangan Golkar. Kemudian, beragam pemberitaan politik dikeluarkan untuk meningkatkan serta menurunkan citra organisasi peserta pemilu lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengetahui pandangan surat kabar Suara Karya dan Merdeka terhadap kampanye politik Golkar pada pemilu 1977 hingga pemilu 1987, dan 2) mengetahui hubungan kampanye Golkar dengan kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode penulisan sejarah, yang meliputi empat tahapan proses yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Di samping menggunakan metode penulisan sejarah, penulis juga menggunakan metode analisis framing model Pan dan Kosicki. Dalam model tersebut, terdapat empat struktur yang mencakup struktur Sintaksis, struktur Skrip, struktur Tematik, dan yang terakhir struktur Retoris.

Kemenangan Golkar pada pemilu Orde Baru menjadi prioritas utama bagi surat kabar Suara Karya. Surat kabar tersebut dari awal pendiriannya telah diatur sebagai media komunikasi politik Golkar. Selama kampanye Pemilu 1977 hingga 1987, Suara Karya secara konsisten mendukung kemenangan Golkar. Di lain pihak, Merdeka tampil sebagai surat kabar cenderung berpihak kepada peserta pemilu lainnya, seperti PDI. Namun, Merdeka juga menyajikan berita seputar kampanye PPP, dan Golkar. Merdeka juga memberikan penonjolan pada kedua peserta Pemilu tersebut. Akan tetapi, porsi penonjolan paling besar diarahkan pada kampanye PDI. Perbedaan ini berkaitan erat dengan latar belakang serta sejarah masing-masing surat kabar. Kampanye Golkar selama Pemilu 1977 hingga 1987, tidak terlepas dari peranan pemerintah di belakangnya. Dalam kemenangannya, Golkar memperoleh dukungan dari Angkatan Bersenjata, birokrasi, dan kekuatan politik dalam Golkar sendiri. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi Golkar, seperti Undang-undang Parpol dan Golkar, dan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Pemilu.

Kata Kunci : *Kampanye politik Golkar, Pemilu Orde Baru, Pers, Analisis Framing*

Abstract

In general, the mass media serve as a platform that conveys information from one source to a target. All aspects of life can be used as a material news in the media, ranging from the political, social, economic, and cultural. Ahead of the election, the campaign became one of the political activity that often fill the pages of newspapers. Election of the New Order was a period of political triumph shutter Golkar in Indonesia. A number of government policies to benefit Golkar victory. Then, a variety of political news was issued to raise and lower the image of the organizations participating in other elections.

The purpose of this study was, 1) to view the newspaper Suara Karya and Merdeka for the Golkar political campaign in the election of 1977 until the elections of 1987, and 2) determine the relationship Golkar campaign with government policy. The method used in writing is a method of writing history, which includes four stages of the process that is heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Besides, the writer use analysis framing method from Pan and Kosicki includes Syntax Structure, Script structure, Tematic structure, and Rhetorical structure.

Golkar victory at the election of Orde Baru became a top priority for the newspaper. The Suara Karya newspaper from its inception has been set as a medium of political communication Golkar. During the election campaign in 1977 until 1987, Suara Karya newspaper has consistently supported Golkar victory. On the other hand, Merdeka appeared as newspapers tend to side with the other election participants, such as PDI. But, Merdeka also

presents news about the campaign PPP and Golkar. Merdeka also gives prominence on both the electoral participants. However, most large protrusion portion directed to the PDI campaign. This difference is closely related to the background and history of each newspaper. Golkar campaign for Election 1977 to 1987, not in spite of the government's role in tow. In victory, Golkar obtain the support of the Armed Forces, Bureaucracy, and the power in Golkar. In addition, the government also passed a law that does not directly benefit Golkar, such as the Political Parties Act and Golkar, and Government Regulation concerning the election.

Keywords: Golkar political campaign, Elections New Order, Press, Analysis Framing

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami beberapa rezim pemerintahan pasca Proklamasi Kemerdekaan. Orde lama merupakan masa pemerintahan pertama pasca kemerdekaan RI di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Berbagai peristiwa sosial politik mengiringi perkembangan bangsa ini kearah kemajuan hingga pergantian pemimpin selanjutnya dengan rezim yang berbeda, yaitu Orde Baru. Orde Baru merupakan sebuah rezim di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun pasca jatuhnya Orde Lama dan peristiwa 1965. Pada Maret 1968, MPRS secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Membangun kembali stabilitas politik dan meminimalisir situasi yang kacau pasca peristiwa 1965 merupakan langkah awal Presiden Soeharto dalam memerintah negeri ini pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Dalam negara Demokrasi pergantian pemimpin dipilih melalui suatu wadah yang dinamakan pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, pemilihan umum diadakan selama enam periode, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Jalannya aktivitas pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari aparat pemilu maupun kontestan politik yang akan bersaing dalam masa kampanye. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹ Pada orde lama, jumlah partai yang mengikuti pemilihan umum sangat banyak dan beragam. Jumlah partai yang terlalu banyak dianggap sebagai masalah pokok yang harus dipecahkan pada masa orde baru. Menanggapi permasalahan tersebut, melalui Keputusan Presiden No. 128, 129, dan 440 tahun 1961 jumlah partai politik dikurangi dari 28 buah yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 1955 menjadi 14 buah.² Kemudian, menjelang pemilihan umum tahun 1971 jumlah tersebut berkurang menjadi 9 partai dan 1 golongan karya. Penyederhanaan partai tersebut berlanjut hingga pada pemilihan umum

1977 yang hanya terdapat 3 organisasi peserta pemilu yang terdiri dari 2 partai politik dan 1 golongan karya. Masing-masing organisasi mewakili beberapa partai politik, kecuali Golongan Karya. Hal ini dipertegas dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Pemilihan umum 1977 merupakan pemilihan umum pertama pasca terjadinya fusi partai politik di Indonesia. Fusi Partai Politik bertujuan untuk memperkecil jumlah peserta Pemilu. Pemilu ini, diikuti oleh tiga kontestan politik, diantaranya PPP, PDI dan Golkar. Golkar atau Golongan Karya merupakan salah satu kontestan politik yang berhasil memperoleh suara terbesar dalam pemilihan umum Orde Baru secara berturut-turut. Strategi politik Golkar di dalamnya terdapat peranan ABRI, birokrasi, dan Golkar. Golkar tidak menyebut dirinya sebagai partai politik tetapi sebagai organisasi yang menampung segala aspirasi masyarakat dari semua golongan. Di dalam tubuh Golkar tidak hanya terdapat para pejabat politik, aktivis, tapi juga golongan buruh, pegawai negeri, dan organisasi masyarakat lainnya. Hal ini memberikan kemudahan bagi Golkar untuk menggalang dukungan dari segala lapisan masyarakat menjelang pemilihan umum.

Pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari pesta demokrasi yang diwujudkan melalui kampanye para kontestan politik. Definisi kampanye menurut Roger dan Storey, merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu.³ Dalam upaya menarik perhatian masyarakat untuk menghadiri kegiatan kampanye, para kontestan politik menyediakan beraneka ragam hiburan dan pesta rakyat yang dibuka dengan aktivitas arak-arakan dan pawai dengan membawa atribut partai masing-masing. Selanjutnya, para jurkam mengemukakan program dan janji politik, berbagai yel-yel partai dan jargon-jargon politik di suarakan. Kemudian, rakyat yang menghadiri kampanye menelan janji-janji tersebut dan menirukan perkataan sang jurkam.

Aktivitas kampanye tidak hanya diramaikan oleh kegiatan arak-arakan, pawai, dan hiburan di tempat terbuka. Segala bentuk pesan kampanye yang disuarakan oleh setiap kontestan politik akan menjadi bahan diskusi di masyarakat, terutama di media massa baik cetak

¹ Miriam budiardjo, 1994, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 200

² Republik Indonesia, Departemen penerangan, Al-Manak Lembaga-lembaga Negara dan Kepartaian Jakarta:Departemen Penerangan RI, 1961.hlm. 435-440 (dalam Arbit Sanit, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 43

³ Rosady Roslan, 2005, *Kiat dan Strategi Kampanye: Kampanye Public Relations*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 23

maupun elektronik. Media massa sebagai sumber informasi menjadi suatu wadah yang tepat dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat menjelang pemilu. Setiap redaksi di media massa akan mengulas isu-isu politik saat kampanye berupa saran atau kritikan terhadap pesan yang disampaikan oleh para kontestan politik. Di media cetak seperti surat kabar ulasan politik biasanya disisipkan di rubrik opini, bahkan disediakan kolom khusus yang membahas isu-isu politik dan kegiatan kampanye para kontestan yang diselenggarakan di berbagai daerah. Para kontestan politik saling bersaing dalam meningkatkan citra positifnya dengan menampilkan orang-orang yang sedang populer dan berpengaruh untuk berargumentasi politik di surat kabar. Golkar sebagai salah satu kontestan politik Orde Baru yang dekat dengan pemerintah mempunyai jaringan yang luas dalam menyuarakan program-program politiknya. Hal ini dapat dipastikan bahwa kemenangan Golkar secara berturut-turut tidak bisa dilepaskan dari pemberitaan media massa yang memperbincangkan berbagai aktivitas kampanye dan isu-isu politik menjelang pemilu Orde Baru.

Pemberitaan aktivitas kampanye antara pendukung kontestan politik satu dengan yang lain saling bersaing bahkan tidak jarang terjadi adu argumen. Khalayak disuguhkan beraneka ragam isu-isu yang mampu mempengaruhi suara yang diberikan dalam pemilu. Kegiatan kampanye politik yang selalu ramai diperbincangkan di media massa sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama kegiatan kampanye Golkar. Golkar yang selalu memperoleh suara terbesar dalam pemilu Orde Baru pastinya mempunyai strategi khusus selama aktivitas kampanye politik berlangsung baik dari segi komunikator politik maupun isu-isu politik yang disajikan dalam pemberitaan media massa. Terlebih, pada masa Orde Baru Golkar termasuk bagian dari partai pemerintah. Kampanye politik yang selalu menjadi aktivitas menjelang pemilu merupakan salah satu budaya politik yang khas di Indonesia. Oleh sebab itu, topik ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian sejarah.

Surat kabar yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah surat kabar Suara Karya dan Merdeka. Alasan pemilihan surat kabar ini adalah karena kedua surat kabar ini memberitakan kampanye politik Golkar dengan cara yang berbeda. Jika Suara Karya cenderung memihak pada Golkar, maka surat kabar Merdeka lebih netral dengan memberikan porsi yang hampir sama untuk ketiga kontestan politik. Hal ini bisa dilihat dari bahasa dan porsi artikel mengenai pemberitaan kampanye politik pada surat kabar Merdeka. Meskipun, pada dasarnya hampir semua surat kabar Orde Baru pro terhadap Golkar sebagai bagian dari partai pemerintah.

Penelitian yang berkaitan dengan kampanye politik sebelumnya pernah dilakukan. Penelitian karya Nia Endra Puspita yang berjudul Strategi Politik dan Kemenangan Golkar di Semarang Pada Pemilu 1971 yang mengenai strategi politik Golkar dalam upaya

pemenangan pemilu 1971 di Semarang yang yang tidak terlepas dari peranan ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Kemudian buku karya Leo Suryadinata yang berjudul Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik yang membahas mengenai sejarah dan budaya politik Golkar pada masa Orde Baru.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul “Strategi Kampanye Politik Golkar Pada Pemilihan Umum 1977-1987: Dalam Perspektif Pemberitaan di Surat Kabar Suara Karya dan Merdeka”. Penulis ingin mengkaji isu-isu politik dalam kampanye Golkar yang diberitakan di surat kabar Suara Karya dan Merdeka dalam upaya pemenangan pemilu Orde Baru. Kemudian, dari pemilu 1977 ke 1982 dan 1982 ke 1987 terdapat perkembangan atau tidak dalam pemberitaan kampanye di Suara Karya maupun Merdeka. Selanjutnya, berdasarkan isu-isu kampanye tersebut, penulis juga ingin mengkaji mengenai hubungan strategi kampanye Golkar dengan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan saat itu.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi kampanye Golkar dalam upaya pemenangan pemilu 1977, 1982, dan 1987 dalam pemberitaan surat kabar Suara Karya dan Merdeka?
2. Apakah strategi tersebut bagian dari kebijakan pemerintah Orde Baru?

METODE

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu proses pengujian, dan analisis sumber atau laporan yang berasal dari masa lampau secara kritis.⁴ Langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap-tahap penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

Tahap pertama yaitu pengumpulan sumber. Tahap ini diawali dengan menentukan sebuah tema, topik yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Penulis mengambil judul Strategi Kampanye Politik Golkar Pada Pemilihan Umum 1977-1987: Dalam Perspektif Pemberitaan di Surat Kabar Suara Karya dan Merdeka. Kemudian penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah terkait dengan judul yang diambil. Pada tahap ini sumber dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari artikel dan berita dari surat kabar terutama Suara Karya (April 1977), Suara Karya (April 1982), Suara Karya (Maret dan April 1987), dan Merdeka (April 1977), Merdeka (April 1982), Merdeka (Maret dan April 1987).

Selanjutnya, sumber sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan topik yang tema yang diambil, diantaranya buku karya Leo Suryadinata yang berjudul Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik, buku karya R. William Liddle yang berjudul Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan

⁴ Louis Gotschalk, 1973, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Depok : UI, hlm 5.

Politik di Indonesia, selanjutnya buku karya R. William Liddle juga yang berjudul *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia Awal Orde Baru*, buku karya Farchan Bulkin yang berjudul *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, buku karya Julian Boileau yang berjudul *Golkar: Functional Group Politics In Indonesia*, dan buku karya C.S.T. Kansil yang berjudul *Parpol dan Golkar: Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*. Sumber-sumber sejarah tersebut banyak diperoleh dari Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, dan Perpustakaan Nasional di Jakarta.

Tahap kedua dalam penelitian sejarah yaitu kritik sumber. Pada tahap ini peneliti akan melakukan kritik terhadap sumber yang diperoleh untuk mendapatkan fakta sejarah yang valid. Terdapat dua bentuk kritik sumber, yaitu kritik intern dan kritik ekstern.⁵ Dalam penelitian ini, kritik yang digunakan adalah kritik intern yang menelaah isi sumber. Hal ini dikarenakan sumber yang diteliti merupakan peristiwa yang memerlukan sumber utama berupa surat kabar, arsip, dan buku-buku pendukung yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Penulis juga berupaya memperhatikan sudut pandang atau subyektifitas sumber yang digunakan.

Tahap ketiga, yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan dalam penulisan sejarah setelah tahap heuristik dan kritik. Tahap interpretasi dapat dilakukan dengan analisis dan sintesis. Menganalisis suatu data sama dengan menghubungkan sumber yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Berbeda dengan analisis, sintesis merupakan tahapan mengelompokkan data-data menjadi satu kemudian disimpulkan.⁶ Pada tahap interpretasi, penulis menggunakan analisis *framing* Pan dan Kosicki untuk mengetahui pemberitaan kampanye politik Golkar dalam surat kabar Suara Karya dan Merdeka. Penggunaan model Pan dan Kosicki didasarkan pada asumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan elemen yang berbeda dalam teks berita seperti kutipan, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan.

Di dalam metode ini, terdapat beberapa perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.⁷ **Struktur Sintaksis** bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. Kemudian, struktur **Skrip** melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. Selanjutnya, struktur **Tematik** berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam

preposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil. Struktur **Retoris** berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retorik melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar, yang juga dipakai guna memberi penekanan pada arti tertentu.⁸

Tahap terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Tahapan ini meliputi cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dalam penulisan hasil penelitian ini, peneliti memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (perencanaan) hingga akhir (penarikan kesimpulan).⁹ Gambaran ini kemudian disusun dalam sistematika yang secara garis besar terdiri atas tiga bagian: (1) pengantar, (2) hasil penelitian, dan (3) kesimpulan. Setiap bagian dijabarkan dalam bab-bab yang memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti akan menyajikan sebuah tulisan sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Frame Isu Politik Dalam Surat Kabar Suara Karya dan Merdeka Pada Pemilu 1977-1987

1. Pemberitaan berkaitan dengan Agama

Menjelang Pemilu 1977, Suara Karya berusaha menghilangkan citra Golkar sebagai peserta Pemilu yang anti Islam. Namun, Merdeka yang nasionalis tidak mengeluarkan isu politik serupa. Di bawah ini, salah satu berita di Suara Karya yang bertujuan meningkatkan citranya sebagai peserta Pemilu di hadapan masyarakat.

a. Suara Karya, 18 Maret 1977 (*Judul: Pemilu Bukan Pemilihan Agama*)

Analisis *Sintaksis* berita ini menunjukkan kampanye Golkar di Malang dan Kediri yang menghadirkan tokoh muslimat, seperti Ny. Hadijah Hasan. Juru kampanye Golkar tersebut menegaskan bahwa Pemilu diadakan bukan untuk memilih agama, melainkan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kemudian dari segi *Skrip*, yang menganalisa cara wartawan mengisahkan fakta, menunjukkan bahwa aspek 5W+1H sudah lengkap dalam berita ini. Adapun dari segi *Tematik*, berita ini secara keseluruhan membahas mengenai kampanye Golkar di Malang dan Kediri. Di kedua tempat tersebut, Golkar menghadirkan juru kampanye, seperti Mashuri, Sugiyanto selaku Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Agus Sudono, Akbar Tanjung, dan Habib Alwi Alatas. Dalam kampanye tersebut, Mashuri membuka luka lama mengenai perekonomian negara yang menurun pada masa Orde Lama, dilanjutkan dengan aksi PKI yang berujung peristiwa mengenaskan di Lubang Buaya. Dalam keterpurukan tersebut, Golkar hadir dan membawa kemajuan bagi

⁵ *Ibid*, hlm. 81-83

⁶ Suhartono W. Pranoto, 2010, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.

⁷ Alex Sobur, 2009, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 175.

⁸ *Ibid*, hlm. 175-176

⁹ Aminuddin Kasdi, 2008, *Memahami Sejarah*, Surabaya: Unesa University Press, hlm. 10-11.

Indonesia masa Orde Baru. Kampanye juga diisi oleh seorang tokoh muslimat, yakni Ny. Hadijah Hasan. Dalam berita ini, ia berusaha menegaskan bahwa Golkar juga memperhatikan umat muslim.

Dari segi *Retoris*, Suara Karya berusaha menekankan bahwa Golkar hadir dalam politik pemerintahan untuk membawa kemajuan bagi Indonesia. Selain itu, Suara Karya juga mengajak masyarakat untuk melihat bahwa Golkar mampu mengentaskan masyarakat dari keterpurukan pasca peristiwa G 30 S 1965. Penekanan juga terdapat pada kalimat, "Ya bertanya lagi: "Di bawah pemerintahan mana ribuan musholla dan masjid di bangun, pesantren2 dibantu, ratusan ribu jemaah naik haji?" yang kemudian di lanjutkan dengan sahutan rakyat, "Pemerintah Golkar". Dalam hal ini, Suara Karya berusaha mengajak masyarakat untuk tidak terpaku pada agama. Suara Karya berusaha menegaskan bahwa pembangunan Orde Baru, adalah kerja keras Golkar sehingga rakyat patut memilih Golkar dalam Pemilu 1977.

Pemberitaan ini tidak mendapat tanggapan oleh Merdeka. Pada Pemilu 1977, Merdeka sedikit memberikan perhatian pada kampanye Golkar. Perhatian Merdeka lebih banyak diberikan kepada PDI dan PPP. Pemberitaan kampanye PDI dan PPP mempunyai porsi yang lebih besar daripada pemberitaan kampanye Golkar.

2. Pemberitaan berkaitan dengan isu pemalsuan surat oleh PPP

Tuduhan pemalsuan surat suara yang diberikan kepada PPP pada Pemilu 1977, mendapat reaksi yang berbeda dari Suara Karya dan Merdeka. Pemberitaan Suara Karya cenderung menyudutkan PPP, sedangkan Merdeka lebih kritis dan memposisikan dirinya ditengah dengan memberikan klarifikasi perihal tuduhan tersebut.

a. Suara Karya, 19 April 1977 (*Judul: PPP Palsukan Surat Suara*)

Ditinjau dari segi *Sintaksis*, berita ini berlatar informasi bahwa menjelang Pemilu 1977 terdapat 60.000 surat suara palsu yang telah ditahan polisi. Berita ini telah memenuhi unsur 5W+1H sebagai bagian dari analisa *Skrip*. Segi *Tematik*, menunjukkan bahwa dalam berita ini Suara Karya membahas perihal penggunaan surat suara palsu yang dituduhkan kepada pihak PPP. Surat suara palsu ini dikeluarkan oleh percetakan milik M.LY yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian, ditinjau dari segi *Retoris*, Suara Karya berusaha menghubungkan kasus pemalsuan surat suara tersebut dengan keterangan dari Menteri Dalam Negeri Amirmachmud sewaktu melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Dengan demikian, Suara Karya berusaha menunjukkan bahwa PPP selaku bagian dari peserta Pemilu 1977 yang tidak sportif.

b. Merdeka, 23 April 1977 (*Judul: PPP Bantah Tuduhan Pemalsuan Surat Suara*)

Berdasarkan *lead* berita, analisa *Sintaksis* menunjukkan bahwa berita ini berlatar informasi pembantahan pemalsuan surat suara yang dituduhkan ke pihak PPP dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua PPP Sumut pada hari Jum'at di Kantor DPP PPP di Jl. Diponegoro. Selanjutnya dari segi *Skrip*, aspek 5W+1H telah terpenuhi dalam berita ini. Selanjutnya dari segi *Tematik*, berita ini menjelaskan adanya kesalahpahaman mengenai surat suara. Surat suara yang dituduh dipalsukan sebenarnya adalah formulir surat suara yang dicetak oleh pihak PPP untuk peragaan Pemilu para anggotanya, bukan disebarakan untuk umum. Mahbub selaku Wakil Ketua Sekjen DPP PPP, meegaskan bahwa pihak PPP tidak mempunyai keahlian untuk melakukan pemalsuan surat suara. Selanjutnya, dari segi *Retoris*, pembantahan tuduhan di perkuat dengan permintaan Mahbub kepada mahasiswa untuk turut serta mengawasi jalannya Pemilu 1977 di TPS untuk menghindari adanya kecurangan. Kemudian berkenaan dengan alasan pembantahan, dimana surat suara digunakan sebagai peragaan adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat tata cara memilih yang benar, seperti menusuk tanda gambar. Merdeka berusaha mengarahkan masyarakat untuk kembali bersimpati pada PPP, dengan menyampaikan klarifikasi dari pihak PPP secara lugas

3. Pemberitaan Kampanye di Lapangan Banteng

Dalam pemberitaan perihal kerusuhan kampanye di Lapangan Banteng, dilihat dari judul berita saja sudah dapat diketahui perbedaan pemberitaan di Suara Karya dan Merdeka. Suara Karya dalam pemberitaan menyatakan bahwa Golkar sukses berkampanye di Jakarta, sedangkan Merdeka secara jelas menyebutkan bahwa kampanye Golkar di Lapangan Banteng batal. Hal ini menunjukkan bahwa Suara Karya terlihat menutupi kegagalan kampanye Golkar. Analisa lebih rinci akan dijelaskan pada struktur *framing* di bawah ini:

a. Suara Karya, 19 Maret 1982 (*Judul: Kampanye Golkar Diberbagai Wilayah Jakarta Sukses*)

Ditinjau dari *lead*, Analisis *Sintaksis* menunjukkan adanya pengacauan kampanye Golkar yang diadakan di Lapangan Banteng, ketika kampanye Golkar yang diadakan diberbagai wilayah Jakarta berjalan sukses. Dalam pengacauan tersebut, terdapat 89 orang ditangkap. Kemudian dari segi *Skrip*, unsur 5W+1H sudah terpenuhi dalam berita ini. Sementara dari segi *Tematik*, secara keseluruhan berita ini membahas mengenai kekacauan yang terjadi di Lapangan Banteng pada 18 Maret 1982, tepatnya ketika diadakan kampanye Golkar. Berkenaan dengan kerusuhan dalam kampanye Golkar tersebut, Gubernur DKI, H. Tjokropranolo meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Golkar dan kepada Ali Moertopo selaku calon tetap nomor satu DKI Jaya. Akibat dari pengacauan tersebut terdapat delapan puluh sembilan pengacau ditangkap pihak keamanan. Selanjutnya, dari segi *Retoris*, penekanan terletak

pada judul yang digunakan, yakni Kampanye Golkar Di Berbagai Wilayah Jakarta Sukses". Suara Karya ingin menunjukkan bahwa kampanye Golkar yang diadakan di beberapa wilayah Jakarta sukses, meskipun kampanye Golkar yang diadakan di Lapangan Banteng mengalami kerusuhan.

b. Merdeka, 19 Maret 1982 (*Judul: Kampanye Golkar di Lapangan Banteng Batal*)

Dilihat dari *lead* berita, analisis *Sintaksis* menunjukkan pertemuan yang diadakan oleh Pangkoptim untuk mendiskusikan kerusuhan yang terjadi pada kampanye Golkar yang diadakan di Lapangan Banteng. Kemudian ditinjau dari segi *Skrip*, unsur 5W+1H telah terpenuhi dalam berita ini. Segi *Tematik*, secara keseluruhan berita ini menjelaskan perihal kerusuhan yang terjadi di Lapangan Banteng. Dalam kerusuhan tersebut, terdapat 89 orang ditangkap pihak keamanan. Namun, berdasarkan keterangan dari Ahmadi selaku ketua DPD Golkar DKI Jakarta, belum ditemukan motif yang jelas yang melatarbelakangi terjadinya kerusuhan tersebut. Namun, Sukardi selaku ketua DPP Golkar menambahkan, kemungkinan kejadian tersebut disebabkan oleh orang-orang yang tidak menghendaki Pemilu 1982 berjalan dengan lancar. Pembahasan dilanjutkan dengan kampanye ketiga kontestan di Jabar yang berlangsung tertib. Ditinjau dari segi *Retoris*, tidak ditemukan penekanan dalam berita ini, ditinjau dari judul maupun isi berita. Gambar yang ditampilkan oleh Merdeka hanya menjelaskan suasana Lapangan Banteng sebelum terjadinya pengacauan.

4. Pemberitaan kampanye yang berhubungan dengan Pancasila

Pemberitaan yang menyangkut Pancasila hanya dikeluarkan oleh Suara Karya. Merdeka hanya mengeluarkan pemberitaan membahas mengenai pentingnya ideologi atau pandangan hidup bangsa, tanpa mengaitkan Pancasila dengan peserta Pemilu. Di bawah ini struktur frame dari Suara Karya yang menghubungkan Pancasila dengan Golkar:

a. Suara Karya, 8 April 1982 (*Judul: Pancasila Harus Jadi Pegangan Kader Bangsa*)

Dari segi *Sintaksis*, Berita ini disusun berdasarkan wejangan Soedjono Hoemardani kepada generasi muda AMPI seluruh kawasan karesidenan Surakarta. Menurutnya, setiap kader politik harus berpegangan teguh pada Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup negara dan bangsa. Kemudian dari segi *Skrip*, unsur 5W+1H pada berita ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, dari segi *Tematik*, secara keseluruhan berita ingin menunjukkan bahwa Soedjono Hoemardani selaku Calon tetap Golkar dari Jawa Tengah sangat antusias dalam mendukung pelaksanaan Tap II/MPR RI/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam wejangannya kepada generasi muda AMPI, ia mengemukakan diperlukannya kader politik bangsa

yang mampu mempertahankan eksistensi bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dengan demikian, kader bangsa harus memiliki "Moralitas Pancasila" agar mampu mengalahkan kepentingan pribadi dan golongan di bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan dan kemasyarakatan. Kemudian, Soedjono Hoemardani juga menghimbau kepada generasi muda AMPI untuk waspada terhadap ekstrem kanan dan kiri yang berusaha menghapus UUD 1945 dan Pancasila.

Analisis *Retoris* terdapat pada kata "sejauh mana" yang menunjukkan bahwa kelangsungan hidup bangsa Indonesia berjalan seiring dengan pengamalan Pancasila. Penekanan selanjutnya, terletak pada kata "sambutan hangat". Kata ini, ingin menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon yang baik kepada Soedjono Hoemardani selaku calon Golkar yang berpegang teguh pada Pancasila.

5. Pemberitaan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan

Suara Karya dan Merdeka saling menanggapi satu sama lain mengenai klaim pemerintahan dan keberhasilan pembangunan sebagai milik sebuah golongan. Suara Karya memberikan penegasan yang diletakkan pada narasumber yang diwawancarai. Di lain kesempatan, Merdeka mengeluarkan berita tersebut sebagai headline surat kabar. Hal ini menunjukkan bahwa Merdeka berusaha memusatkan perhatian pembaca pada berita tersebut. Penjelasan lebih detail akan dibahas pada struktur frame surat kabar di bawah ini:

a. Suara Karya, 1 April 1982 (*Judul: Pembangunan tidak bisa dilepaskan Dari Golkar*)

Analisis *Sintaksis* menunjukkan bahwa berita ini berusaha mengungkapkan keberhasilan pembangunan yang tidak dapat dilepaskan dari peranan Golkar. Hal ini bisa diketahui dari *lead* yang digunakan. Kemudian, aspek 5W+1H yang menunjukkan segi *Skrip* telah terpenuhi dalam berita ini. Segi *Tematik*, berita ini secara keseluruhan mengemukakan perihal penjelasan Wakil Presiden Adam Malik mengenai besarnya pengaruh Golkar dalam keberhasilan pembangunan Orde Baru. Dalam berita ini, Suara Karya juga menginformasikan himbauan Wapres Adam Malik kepada para peserta Pemilu agar tetap berpegang teguh pada ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang ada.

Analisa segi *Retoris*, menunjukkan adanya penekanan pada kata "Wapres Tegaskan", yang menunjukkan bahwa pemberitaan ini bersumber dari orang yang mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan. Suara Karya juga menegaskan bahwa orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah bagian dari Golkar. Dengan demikian, Suara Karya berusaha mengarahkan masyarakat untuk konsisten memilih Golkar agar pembangunan tetap berjalan.

b. Merdeka, 5 April 1982 (*Judul: Anggota Komisi I DPR Meminta kepada Presiden: Soal Pemerintahan Golkar Perlu Segera Dijelaskan*)

Berita ini dijadikan sebagai headline surat kabar Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa Merdeka ingin memusatkan perhatian masyarakat pada berita ini. Usaha mengarahkan masyarakat untuk fokus pada pemberitaan ini bisa dimasukkan dalam analisa *Retoris*. Ditinjau dari *lead*, Chalik Ali selaku anggota pimpinan pusat PPP mengemukakan perlunya penjelasan dari Presiden perihal isu diklaimnya suatu pemerintahan sebagai keberhasilan sebuah golongan di Indonesia. Klaim tersebut dianggap bertentangan dengan cita-cita yang dicetuskan sejak awal Orde Baru yakni suatu pemerintahan Gotong Royong.

Dari segi *Skrip*, aspek 5W+1H sudah lengkap. Kemudian dari segi *Tematik*, berita ini mengemukakan bahwa diperlukannya suatu penjelasan lebih lanjut dari Presiden mengenai isu yang beredar di masyarakat. Pemberitaan ini berupaya menjelaskan kepada masyarakat bahwa parpol juga mempunyai peranan dalam pembangunan nasional. Pembangunan bukan milik golongan sehingga meskipun Parpol menang di suatu tempat dalam pemilu, Pancasila dan UUD 1945 tidak akan terancam, dan pembangunan tidak akan terhenti. Analisa *Retoris* menunjukkan penekanan pada kata "Tolok Ukur" yang dicetak tebal. Tolok ukur yang dimaksud adalah hasil pemilu. Kepercayaan dari rakyatlah yang menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan. Merdeka berusaha menguatkan argumen Chalik Ali yang ingin menegaskan bahwa parpol pun berhak memegang pemerintahan.

6. Pemberitaan mengenai Sidang Peristiwa Lapangan Banteng

Berita yang dikeluarkan secara bersamaan pasca sidang kerusuhan kampanye di Lapangan Banteng ini, menunjukkan perbedaan yang signifikan ditinjau dari penggunaan kata dalam judul dan penyampaian deskripsi kronologi kerusuhan tersebut selama proses sidang. Di bawah ini struktur frame kedua Suara Karya dan Merdeka perihal pemberitaan sidang kerusuhan kampanye Lapangan Banteng:

a. Suara Karya, 15 April 1982 (*Judul: Sidang Teror Lapangan Banteng Dimulai*)

Berdasarkan *lead* berita, analisis segi *Sintaksis* berlatarkan informasi bahwa terdakwa JHB yang memekikkan kata "Hidup Ka'bah di tengah-tengah kampanye Golkar. Kemudian dari segi *Skrip*, unsur 5W+1H telah terpenuhi dalam berita ini. Segi *Tematik*, secara keseluruhan berita ini mengemukakan mengenai pemeriksaan secara serentak delapan terdakwa pengacauan Lapangan Banteng, yakni JHB, HKK, AS, DR, MI, ES, dan NS oleh empat tim majelis hakim. Keterangan para terdakwa tersebut ditampilkan Suara Karya secara mendetail dan runtut, dimulai dari peneriakan kata "Hidup Ka'bah", pelemparan batu, hingga penurunan dan penyobekan tanda gambar Golkar.

Selanjutnya dari segi *Retoris*, terlihat ada penekanan pada penggunaan kata "Teror" pada judul

berita. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.¹⁰ dalam pemberitaan tersebut Suara Karya menunjukkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Suara Karya berusaha menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh delapan terdakwa dalam kampanye Lapangan Banteng adalah bagian dari pelanggaran hukum.

b. Merdeka, 15 April 1982 (*Judul: Umumnya tertuduh akan nonton kampanye Golkar*)

Berdasarkan *lead* berita, dari segi *Sintaksis* menunjukkan proses persidangan oknum-oknum yang terlibat pengacauan kampanye Golkar di Lapangan Banteng. Dalam persidangan tersebut, dihadirkan delapan orang yang tertuduh terlibat dalam kekacauan tersebut. Segi *Skrip* menunjukkan bahwa aspek 5W+1H telah terpenuhi dalam berita ini. Sementara dari segi *Tematik*, secara keseluruhan berita ini mengemukakan kronologi persidangan kekacauan kampanye Golkar di Lapangan Banteng yang terjadi pada 18 Maret 1982. Sidang ditangani oleh empat majelis hakim. Dalam menuliskan berita, Merdeka menampilkan keterangan dari pihak saksi, tertuduh yang menyuarakan PPP, dan tertuduh yang berasal dari pendukung Golkar. Namun, persidangan ditunda dan dilanjutkan pada 17 April 1982. Selanjutnya dari segi *Retoris*, tidak ada penekanan dalam berita tersebut. Kronologi persidangan disampaikan Merdeka dengan lugas dan jelas. Tidak ada kecenderungan memihak pada salah satu peserta Pemilu.

7. Pemberitaan tentang pengaruh kemenangan PPP terhadap ideologi Pancasila

Berita yang berkaitan dengan isu kemenangan PPP yang mengancam ideologi Pancasila banyak ditemukan dalam pemberitaan Suara Karya. Dalam upaya menanggapi isu tersebut, Merdeka mengeluarkan berita yang menyebutkan bahwa kemenangan PPP tidak akan mempengaruhi keberadaan ideologi yang dianut bangsa Indonesia.. Berikut struktur frame berita tersebut:

a. Suara Karya, 14 April 1982 (*Judul: Kelestarian Pancasila Tak Terjamin jika P3 Menang*)

Berita ini dijadikan *headline* surat kabar Suara Karya. Dilihat dari *lead*, segi *Sintaksis* menyatakan kekhawatiran Marzuki Darusman SH terhadap kelestarian Pancasila sebagai ideologi. Kemudian dari segi *Skrip*, aspek 5W+1H pada berita ini telah terpenuhi. Sementara dalam struktur *Tematik* bisa dipahami bahwa dalam pemilihan umum seharusnya tidak menyangkut-pautkan urusan agama dengan urusan politik. Indonesia yang mempunyai asas dasar Pancasila, seharusnya lebih diutamakan di atas asas ciri apapun. Dan Golkar sebagai kontestan politik yang hanya mempunyai satu asas, yakni

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), diakses dari <http://kbbi.web.id/teror>, pada 14 Juli 2016 pukul 13:20

Pancasila menjunjung tinggi asas dasar tersebut dalam politiknya. Wartawan berpandangan bahwa PPP sebagai kontestan dengan asas ciri Islam menganjurkan masyarakat beragam Islam untuk memilihnya. Dan cara itu dianggap sebagai cara yang temporer dalam menarik simpati rakyat, buka pendidikan politik.

Ditinjau segi *Retoris* menunjukkan adanya penekanan pada kalimat “Timbul kesan masih ada pihak-pihak yang merasa terancam oleh ideologi Pancasila”. Kalimat tersebut menegaskan bahwa terdapat pihak yang berusaha menggantikan ideologi tersebut. Penekanan selanjutnya, terdapat pada kalimat kata “masalah ideologi harus jernih”. Artinya masyarakat harus bisa membedakan urusan agama dan urusan politik. Jadi di sini wartawan suara karya berupaya mengarahkan masyarakat ke Pancasila agar tidak terkungkung oleh Islam yang dijadikan asas ciri PPP. Dengan kata lain, suara karya menjauhkan rakyat dari kontestan PPP dan sebaliknya mendekatkan rakyat kepada Golkar. Karena Golkar di sini, diberitakan sebagai kontestan yang berideologi Pancasila yang mengedepankan pendidikan politik.

b. Merdeka, 16 April 1982 (*Judul: Kalau PPP menang, Indonesia takkan jadi negara Islam*)

Analisa segi *Sintaksis* menunjukkan, berita ini berlatarkan informasi bahwa Kampanye PPP yang dilaksanakan pada 11 April 1982 di desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur mendapat respon yang baik dari masyarakat. Segi *Skrip*, unsur 5W+1H pada berita ini telah terpenuhi. Sementara dari segi *Tematik*, secara keseluruhan berita ini membahas mengenai kampanye PPP yang diadakan di Jember Jawa Timur. Dalam kampanye tersebut, PPP Djumin mengungkapkan bahwa pemerintahan bukan milik golongan melainkan milik semua rakyat. Dengan demikian, diharapkan aparat desa tidak membedakan PPP, PDI, maupun Golkar. Kemudian dari segi *Retoris*, penekanan terdapat pada judul. Judul “Kalau PPP Menang, Indonesia Takkan Jadi Negara Islam” berusaha menegaskan bahwa kemenangan PPP tidak mengancam keberadaan ideologi yang dianut bangsa Indonesia. Dalam berita ini, Merdeka terlihat berusaha menanggapi isu yang beredar mengenai terancamnya Pancasila apabila PPP memenangkan Pemilu 1982.

8. Pemberitaan mengenai kekacauan pada peristiwa Pawai Merah Putih

Kedua berita di atas menyajikan fakta yang sama mengenai keterlibatan simpatisan PPP dalam kerusuhan Pawai Merah Putih yang diadakan Golkar. Keduanya juga menggunakan berita ini sebagai headline surat kabar masing-masing, baik Suara Karya maupun Merdeka. Namun, terdapat perbedaan pada judul yang digunakan. Meskipun hampir sama, tapi judul berita yang digunakan oleh Suara Karya langsung mengarah pada simpatisan PPP sebagai

sumber dari kerusuhan pawai. Berikut struktur frame Suara Karya dan Merdeka:

a. Suara Karya, 27 April 1982 (*Judul: 130 Pengacau Pawai Merah Putih Ditahan*)

Ditinjau dari segi *Sintaksis*, latar informasi berita ini adalah penyesalan dari Laksamana TNI Sudomo selaku Pangkopkamtib terhadap tindakan kekerasan dipinggir jalan yang berusaha menggagalkan Pawai Merah Putih yang diadakan Golkar. Kemudian dari segi *Skrip*, aspek 5W+1H sudah terpenuhi dalam berita ini. Segi *Tematik* menunjukkan bahwa berita ini membahas mengenai kerusuhan pawai merah putih yang diadakan oleh Golkar. Dalam kerusuhan tersebut terdapat 6 orang meninggal, 130 orang ditahan, dan 97 orang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Dalam berita ini juga dikemukakan bahwa diantara para pengacau tersebut adalah para simpatisan PPP. Hal ini diperjelas dengan keterangan salah satu pengacau. Keterangan dari salah satu pengacau pawai menjadi bagian dari analisis *Retoris*, dimana keterangan tersebut berusaha menegaskan bahwa para simpatisan PPP terlibat dalam kerusuhan pawai merah putih. Penekanan pada berita juga terletak pada kalimat “Di antaranya Simpatisan PPP” yang di sajikan tepat di bawah judul berita yang dijadikan headline surat kabar. Kalimat tersebut berusaha melanjutkan judul “130 Pengacau Pawai Merah Putih Ditahan” sehingga secara tidak langsung Suara Karya berusaha menegaskan bahwa kerusuhan tersebut sengaja dilakukan oleh para simpatisan PPP.

b. Merdeka, 27 April 1982 (*Judul: Enam Tewas, 97 Luka-luka dan 130 Ditangkap*)

Berdasarkan *lead* berita, segi *Sintaksis* menunjukkan bahwa Kampanye Golkar yang diadakan di Ibukota menuai korban tewas, luka-luka, hingga penangkapan oleh pihak yang berwajib. Informasi ini bersumber dari Pangkopkamtib Laksamana TNI Sudomo. Ditinjau dari segi *Skrip*, unsur 5W+1H sudah lengkap dan ditampilkan dengan jelas oleh Merdeka. Segi *Tematik*, secara keseluruhan, insiden penyerangan pawai kampanye Golkar disebabkan oleh massa yang berada di pinggiran jalan ketika pawai Golkar dilaksanakan. Dan mereka bukanlah massa Golkar. Hal ini dibuktikan dengan penemuan tanda gambar PPP pada barang bukti yang disita Laksusda Jaya. Mengenai korban yang tewas, Laksamana TNI Sudomo menjelaskan adanya peluru yang nyasar yang dilepaskan oleh pihak keamanan untuk membubarkan massa. Pemberitaan ini juga mengungkapkan kemarahan Laksamana TNI Sudomo perihal kerusuhan tersebut.

Kemudian apabila dilihat dari segi *Retoris*, Judul “Enam Tewas, 97 Luka-luka dan 130 Ditangkap” ingin menekankan bahwa pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Golkar telah menelan korban yang tidak sedikit, bahkan terdapat korban yang tewas dalam insiden tersebut. Merdeka juga berupaya mengarahkan masyarakat kepada

sumber yang menyebabkan kerusakan tersebut. Berita sangat menyudutkan PPP dengan ditemukannya tanda gambar Ka'bah.

9. Pemberitaan yang menyangkut isu Undang-undang perkawinan

Isu yang berkaitan dengan Undang-undang Perkawinan dikeluarkan Suara Karya menjelang Pemilu 1982. Selama masa kampanye Pemilu 1982, Merdeka tidak mengeluarkan berita yang sejenis, bahkan memberikan tanggapan mengenai Undang-undang Perkawinan. Pemberitaan perihal Undang-undang Perkawinan ini bertujuan untuk menarik perhatian wanita, dimana keberadaan mereka dijunjung tinggi dihadapan pria. Di bawah ini struktur framing Suara Karya dalam berita tanggal 20 April 1982:

- a. Suara Karya, 20 April 1982 (*Judul: UU Perkawinan Hasil Optimal Perjuangan Kaum Wanita*)

Berita ini ditulis berdasarkan pernyataan Ny. N. Soedarsono Sh selaku Wakil Ketua DPP Golkar. Segi Sintaksis menunjukkan munculnya kembali undang-undang perkawinan sebagai isu politik menjelang Pemilu 1982. Dilihat dari *lead* berita, undang-undang perkawinan yang dianggap sebagai hasil perjuangan kaum wanita dijadikan isu politik untuk melemahkan kekuatan salah satu partai oposisi yang pernah menolah kehadiran UU tersebut.

Apabila ditinjau dari segi *Skrip*, aspek 5W+1H telah terpenuhi. Dalam analisa *Tematik*, berita ini ditulis sebagai reaksi keras terhadap ucapan Roma Irama selaku juru kampanye PPP, yang pernah mengucapkan bahwa jika PPP menang, maka UU Perkawinan akan diganti karena bertentangan dengan hukum Islam. Dalam setiap paragrafnya, berita ini sangat mendukung UU Perkawinan, yang memperjuangkan hak-hak wanita. Dan UU Perkawinan yang disebut telah dirintis sejak perjuangan RA. Kartini tersebut, diperjuangkan kembali oleh wanita Golkar.

Penekanan pada segi *Retoris*, terdapat pada sub judul "yang mementahkan akan berhadapan dengan segenap kaum wanita". Kalimat tersebut di cetak agak besar dan diletakkan dalam kotak tapi tidak sebesar ukuran huruf judul. Kalimat tersebut secara langsung mengarahkan salah satu kontestan, sebut saja PPP yang pernah melakukan penolakan terhadap UU Perkawinan. Selanjutnya, pada empat paragraf terakhir, Suara Karya memberitakan adanya perayaan hari kartini dengan tema "kartini-kartini Golkar". Tema ini berupaya menegaskan bahwa Golkar sebagai kontestan politik yang peduli dengan hak-hak kaum wanita.

10. Pemberitaan berkaitan dengan Korpri

Pemberitaan yang berkaitan dengan Korpri juga tidak dikeluarkan oleh Merdeka. Hal ini sangat berbeda jauh dengan Suara Karya yang terlihat bebas dalam menyajikan berita yang berhubungan dengan organ-organ pemerintah.

- a. Suara Karya, 29 April 1982 (*Judul: Warga Korpri Harus Menusuk Golkar*)

Ditinjau dari segi *Sintaksis*, *lead* berita menunjukkan adanya suatu kekacauan yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu yang telah ditindak tegas oleh Pangkopkamtib Laksamana Soedomo sangat. Hal ini dikemukakan oleh Mendagri Amirmachmud selaku Ketua Dewan Pembina Korpri Pusat. Segi *Skrip*, menunjukkan dalam penulisan berita aspek 5W+1H telah terpenuhi. Sementara dari segi *Tematik*, secara keseluruhan berita ini mengemukakan himbauan Mendagri Amirmachmud kepada seluruh warga Korpri untuk memberikan dukungannya kepada Golkar. Selain menghimbau warga Korpri untuk memilih Golkar, Amirmachmud juga membahas masalah ideologi Pancasila yang wajib dijunjung tinggi oleh Warga Korpri untuk mewujudkan stabilitas nasional.

Ditinjau dari segi *Retoris*, terdapat penekanan pada kata "harus" pada judul yang menandakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi Korpri selain Golkar dalam pemilihan umum 1982. Kemudian, adanya penekanan pada kata "haram". Hal ini dimaksudkan bahwa haram bagi Korpri jika tidak memilih Golkar, karena Korpri harus menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945 demi tegaknya stabilitas nasional. Upaya penyelamatan Pancasila yang dimaksud adalah dengan memilih Golkar pada pemilu 1982. Suara Karya berusaha mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar dengan dalih bahwa Golkar merupakan peserta Pemilu yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi bangsa.

11. Pemberitaan kegiatan kampanye Golkar

Kedua berita ini tidak saling berhubungan maupun saling menanggapi. Namun, dari pemberitaan tersebut, dapat diketahui strategi Suara Karya dan Merdeka ketika mendukung peserta Pemilu 1987 melalui penyajian berita kampanye yang berkaitan dengan usaha pemerataan pembangunan. Dalam penyajian berita politiknya, Suara Karya secara konsisten mengarahkan masyarakat kepada keberhasilan Golkar. Hal ini berbeda dengan Merdeka, pada setiap penyajian berita kampanye Golkar senantiasa disisipkan kampanye PDI. Berikut struktur framenya:

- a. Suara Karya, 13 April 1987 (*Judul: Banyak Proyek Sektor PU Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa*)

Segi *Sintaksis*, menunjukkan bahwa berita ini disusun berdasarkan wawancara dengan Dr. Suyono Sosrodarsono berkenaan dengan konsentrasi pembangunan nasional. Sementara untuk segi *Skrip*, 5W+1H sudah lengkap dalam berita ini. Segi *Tematik* menunjukkan bahwa berita ini menjelaskan mengenai dana pemerintah yang mengalir ke pedesaan melalui Sektor Pekerjaan Umum/ PU. Dalam wawancaranya dengan Suara Karya, Dr. Ir. Suyono Sosrodarsono mengemukakan, pemerataan pembangunan berjalan beriringan dengan elemen pembangunan lainnya,

seperti stabilitas nasional dan pertumbuhan perekonomian. Proyek-proyek dalam sektor PU dibangun sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Segi *Retoris*, Suara Karya dalam berita ini berupaya menanggapi isu yang menyatakan bahwa pemerintah Orde Baru lebih mementingkan warga perkotaan daripada warga pedesaan. Oleh sebab itu, Suara Karya menunjukkan realisasi pembangunan, seperti Sektor Pekerjaan Umum/ PU yang mengalir ke Pedesaan, seperti yang ditunjukkan pada data berikut:

REALISASI SELAMA PELITA III	
PENGAIRAN:	
Perbaikan dan peningkatan irigasi	394.651 ha
Pembangunan jaringan irigasi baru	437.271 ha
Penyelamatan hutan, tanah dan air	578.473 ha
Pengembangan daerah rawa	454.505 ha
Jaringan Irigasi tersier	1.688.573 ha
BINA MARGA:	
Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	31.971 km
Penunjang	90.547 km
Peningkatan	10.708 km
Penggantian jembatan	54.176 m
Pembangunan baru	1.384 km
CIPTA KARYA:	
Perumahan Perumnas/swasta	193.218 unit
Perbaikan Kampung di 474 kota	12.347 ha
Pemugaran Perumahan Desa di 4.703 lokasi	100.781 rumah
Penyediaan air bersih	518 kota (S-7/J-2/S-3)

Gambar 3.43 Realisasi selama Pelita III pada berita yang berjudul Banyak Proyek Sektor PU Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa. Gambar ini mendukung analisa dari segi Retoris

Sumber: Suara Karya, 13 April 1987

- b. Merdeka, 14 April 1987 (*Judul: 100.000 Orang ikuti kampanye Golkar di Cengkareng*)

Analisis *sintaksis* menggambarkan mengenai kampanye Golkar di Padang yang menghadirkan Sudharmono sebagai juru kampanye. Dari segi *Skrip*, unsur 5W+1H sudah terpenuhi. Sementara segi *Tematik*, secara keseluruhan, berita ini memuat mengenai kampanye Golkar di Padang, Cengkareng, dan pada bagian akhir dimuat kampanye PDI. Di Padang, Sudharmono mengungkapkan program pembangunan Golkar yang sudah dibuktikan sejak Repelita I sampai IV. Ia juga menghimbau agar warga Golkar tidak terpancing emosi oleh isu-isu yang beredar. Kampanye Golkar di Cengkareng dihadiri oleh tiga Jurkam, yang meliputi Ir. Hartarto, Ny. Suprpti Soeprapto, dan KH. Syafrudin Sapari. Dalam kampanye ini, Jurkam menghimbau agar generasi muda siap dan mampu melanjutkan pembangunan dan mampu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk berkerja keras bersama Golkar. Dan yang terakhir, kampanye PDI diberbagai tempat, seperti Sumut, Semarang, dan Balik papan. Di ketiga tempat tersebut, ditampilkan program-program, juru kampanye, jumlah massa yang mengikuti, dan penjelasan mengenai aktivitas kampanye PDI.

Ditinjau dari segi *Retoris*, dalam berita ini Merdeka menampilkan persaingan antara Golkar dan PDI dalam kampanye pemilu 1987. Selain perihal program dan Jurkam yang dikeluarkan, Merdeka juga menampilkan jumlah massa yang mengikuti kegiatan kampanye. Kedua OPP tersebut, dapat dikatakan saling unjuk gigi dalam berita ini.

Diskusi Hasil Pembingkaihan Kampanye Politik Golkar Dalam Surat Kabar Suara Karya dan Merdeka Pemilihan Umum 1977- 1987

Berdasarkan struktur framing kedua surat kabar di atas, dapat diketahui perbedaan surat kabar Suara Karya dan Merdeka dalam menyampaikan berita kampanye politik Golkar. Suara Karya dalam pemberitaan kampanye Pemilu 1977 berupaya meningkatkan citra Golkar dihadapan umat Islam. Salah satu upayanya, yaitu mengeluarkan berita yang berupaya memisahkan antara kegiatan politik dan agama. Berbeda dengan pemberitaan Suara Karya, Merdeka menampilkan pemberitaan perihal kampanye Golkar 1977 dengan porsi yang lebih sedikit. Pemberitaan mengenai Golkar sangat jarang menempati halaman utama, bahkan ketika ditempatkan pada halaman pertama pun, Golkar memperoleh porsi kolom yang lebih sedikit daripada peserta Pemilu lainnya.

Apabila pada kampanye Pemilu 1977 identik dengan peningkatan citra Golkar sebagai bagian dari umat Islam, maka pada kampanye Pemilu 1982 pemberitaan Suara Karya cenderung pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Suara Karya sebagai surat kabar Golkar, tidak segan-segan mengeluarkan klaim yang menyatakan bahwa pembangunan Orde Baru sebagai hasil kerja keras Golkar. Menanggapi klaim tersebut, Merdeka mengeluarkan berita yang menegaskan bahwa pemerintahan Orde Baru dan keberhasilan pembangunan tidak hanya milik sebuah golongan, melainkan juga hasil kerja keras parpol, baik PDI dan PPP. Suara Karya dan Merdeka mengeluarkan berita yang berbeda perihal kerusuhan kampanye Golkar. Meskipun fakta yang dikemukakan sama, tapi terdapat banyak upaya penonjolan di dalamnya.

Berita-berita yang berhubungan penting dengan organ-organ pemerintah seperti Pancasila, ABRI, dan Korpri senantiasa menjadi isu penting dalam pemberitaan Suara Karya. Suara Karya banyak mengeluarkan berita yang mengaitkan organ-organ pemerintah dengan perjalanan politik Golkar, bahkan mewajibkan untuk mendukung Golkar. Namun, Merdeka tidak memberikan tanggapan mengenai berita tersebut dalam pemberitaannya. Dalam pemberitaan Merdeka selama pemilu 1977 sampai 1987, jarang ditemukan berita kampanye yang mengaitkan Pancasila, ABRI, dan Korpri dengan kampanye politik peserta pemilu.

Pada pemilu 1977 dan 1982, Suara Karya senantiasa menampilkan berita politik perihal usaha pembangunan yang telah dicapai Golkar. Namun, pada pemilu 1987 tema pembangunan tersebut beralih menjadi usaha pemerataan. Suara Karya merupakan satu-satunya surat kabar yang banyak bicara tentang isu politik pada pemilu 1987.¹¹ Apabila selama kampanye pemilihan umum 1987, Suara Karya senantiasa menampilkan berita kampanye politik Golkar secara besar-besaran, maka

¹¹ Harsono Suwardi, 1993, *Peranan Pers Dalam Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 200

tidak demikian dengan Merdeka. Merdeka agak memposisikan dirinya ditengah-tengah, walaupun kadang fanatisme kelompoknya keluar juga. Akan tetapi, berita kampanye politik dalam halaman surat kabar Merdeka mengalami penurunan menjelang pemilu 1987. Persaingan berita kampanye politik antara Suara Karya dan Merdeka pun tidak sebesar pemilu 1982.

Berdasarkan pembahasan di atas bisa diketahui bagaimana Suara Karya berusaha mengarahkan masyarakat Orde Baru untuk mendukung Golkar. Di lain pihak, Merdeka cenderung mengarahkan masyarakat untuk mendukung PDI. Perbedaan haluan ini dipengaruhi oleh ideologi kedua surat kabar. Kedua surat kabar mempunyai pandangan atau ideologi yang berbeda sejak awal pendiriannya. Suara Karya didirikan oleh Ali Moertopo beserta rekannya, seperti Cosmos Batubara, dan Soedjono Hoernadani untuk mendukung kiprah politik Golkar.¹² Berita yang berhubungan dengan Golkar disajikan dengan porsi yang sangat besar. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa pemberitaan pada halaman surat kabar Suara Karya secara keseluruhan berfokus pada politik.¹³

Merdeka didirikan oleh Burhanuddin Muhammad Diah yang merupakan seorang tokoh nasionalisme Indonesia. Besarnya pengaruh B.M. Diah memposisikan Merdeka sebagai surat kabar yang mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi. Dengan demikian, tidak dipungkiri bahwa Merdeka menyalurkan aspirasi politik golongan nasionalis dalam pemberitaannya.¹⁴ PDI merupakan partai politik yang menggunakan Nasionalisme sebagai basis eksistensinya berdampingan dengan Pancasila.¹⁵ Persamaan ideologi tersebut menjadikan PDI mempunyai kedekatan dengan Merdeka sehingga tidak jarang apabila Merdeka cenderung mendukung politik PDI.

Hubungan Kampanye Golkar Dengan Kebijakan Pemerintah

Pemilu Orde Baru nampak sebagai kewajiban daripada sebagai hak warga negara. Pilihan rakyat sudah ditentukan oleh penguasa, yaitu organisasi yang berasaskan Pancasila dan mendukung trilogi pembangunan. Konsep ini disebarluaskan pada semua media massa, termasuk surat kabar. Pemberitaan di surat kabar memperoleh kontrol yang ketat, dimana wacana yang disampaikan harus mendukung kebijaksanaan pemerintah demi menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Kemudian, adanya konsep massa mengambang yang tertera dalam Undang-undang Partai Politik dan Golkar, menjadikan Golkar sebagai organisasi peserta pemilu yang unggul dibandingkan PPP dan PDI, baik dalam sosialisasi maupun mobilisasi. Golkar mempunyai jaringan sampai ke desa atau kelurahan melalui aparat

birokrasi (lurah, pamong desa, camat, bupati, guru hingga menteri) dan militer dapat dengan mudah bergerak mensosialisasikan keberhasilan pembangunan Golkar.

Selama Orde Baru, kontrol pemerintah terhadap rakyat sangat besar, baik melalui organisasi sosial politik maupun media massa. Konsep kepemimpinan ini sering dikenal dengan sebutan hegemoni. Hegemoni merupakan sebuah rantai kemenangan yang diperoleh melalui mekanisme konsensus ketimbang penindasan terhadap kelas sosial lainnya.¹⁶ Konsep hegemoni Antonio Gramsci menyatakan bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi consensus.¹⁷

Berdasarkan konsep teori hegemoni di atas, terlihat jelas bahwa ideologi Pancasila digunakan untuk menimbulkan kesadaran moral masyarakat akan kewajiban mendukung organisasi politik pilihan pemerintah, yakni Golkar. Surat kabar yang mempunyai jangkauan informasi luas, dimanfaatkan sebagai alat hegemoni politik. Surat kabar digunakan pemerintah untuk menanamkan pengaruh dan meningkatkan citra politiknya dihadapan masyarakat. Kemudian ABRI dan Korpri merupakan bagian dari organisasi konsensus yang mendukung Pancasila sebagai asas tunggal yang ditetapkan pemerintah. Jadi, kebijaksanaan pemerintah yang diterapkan secara keseluruhan tidak lain adalah untuk melegitimasi kepemimpinan Soeharto pada masa Orde Baru.

PENUTUP Simpulan

Golkar merupakan salah satu organisasi sosial politik yang secara beruntun memenangkan Pemilu Orde Baru. Pembentukan Golkar dilatarbelakangi oleh kekhawatiran aparat militer dengan pergerakan PKI yang semakin meluas hingga pelosok pedesaan. Disusul oleh Perpres nomor 193/ 1964 yang menginstruksikan kepada organisasi diluar politik untuk bergabung dengan Papol atau membentuk sebuah organisasi. Selama kiprah politiknya, di dalam tubuh Golkar terdapat komponen pemerintah yang berupaya melanggengkan kepemimpinan Presiden Soeharto. Komponen pemerintah tersebut, seperti ABRI, birokrasi, dan kekuatan politik dalam Golkar secara tidak langsung dituntut agar mendukung strategi politik tersebut. Tuntutan ini juga melibatkan peranan pers sebagai media massa. Dengan berdasarkan peraturan dan kode etik yang telah ditetapkan pemerintah, media massa harus bersedia mematuhi dan berpartisipasi mendukung kebijaksanaan tersebut.

¹²Leo Suryadinata, 1992, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, Jakarta:LP3ES, hlm. 45

¹³ Bambang Sadono dkk, 1996, *Profil Pers Indonesia*, Semarang: PT. Djarum Kudus, hlm. 53

¹⁴ Bambang Sadono dkk, *op.cit*, hlm. 44

¹⁵ Leo Suryadinata, *op.cit*, hlm. 116

¹⁶ Nezar Patria dan Andi Arief, 2003, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 121

¹⁷ Roger Simon, 1999, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, hlm. 19-20

Surat kabar sebagai salah satu bagian dari media massa mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pandangan dari surat kabar tersebut. Pemberitaan pada surat kabar yang satu dengan yang lainnya belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Hal ini dikarenakan setiap surat kabar mempunyai kewenangan untuk menampilkan berita sesuai dengan konsep dasar yang dimiliki. Konsep dasar yang dimiliki oleh masing-masing surat kabar bisa diketahui melalui analisis framing, yang membedah bagaimana wartawan membingkai suatu peristiwa dalam pemberitaan surat kabar. Pada masa Pemilu, surat kabar biasanya menjadi sumber informasi perihal apa dan siapa yang penting dalam pemberitaan. Pemilu Orde Baru dapat dikatakan sebagai Pemilu yang di dalamnya banyak keterlibatan pemerintah dalam suara pilihan rakyat. Pemilu digunakan sebagai mesin politik untuk melegitimasi kepemimpinan Presiden. Surat kabar Suara Karya dan Merdeka merupakan salah satu surat kabar nasional yang turut berpartisipasi aktif dalam Pemilu Orde Baru.

Pemberitaan di Suara Karya dan Merdeka tidak jarang saling menimbulkan aksi reaksi di antara keduanya. Isu politik dalam berita yang dikeluarkan Suara Karya, mendapat tanggapan dari Merdeka pada pemberitaan berikutnya. Dalam penyajian berita, tidak jarang terlihat penonjolan informasi, baik di Suara Karya maupun Merdeka. Keduanya mempunyai prinsip dan konsep yang berbeda dalam setiap pemberitaannya. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh faktor ideologi kedua surat kabar tersebut.

Dalam pemberitaannya, Suara Karya cenderung berpihak pada Golkar. Hal ini dikarenakan Suara Karya merupakan surat kabar yang didirikan oleh Ali Moertopo sebagai pendobrak eksistensi Golkar dalam pemilihan umum Orde Baru. Suara Karya berusaha mengarahkan masyarakat Orde Baru untuk berpartisipasi dalam Golkar. Beragam isu politik dikeluarkan Suara Karya untuk meningkatkan citra Golkar. Di lain pihak, Merdeka yang identik sebagai surat kabar nasionalis berusaha memposisikan dirinya di tengah-tengah dan kritis terhadap pemberitaan. Namun, adakalanya Merdeka mempunyai kecenderungan untuk mengarahkan masyarakat pada politik PDI. Hubungan Merdeka dan PDI tidak lain adalah faktor ideologi yang menjadi basis eksistensi keduanya. Karena ditinjau dari segi historis, Merdeka didirikan oleh B.M. Diah beserta kelompoknya yang merupakan tokoh nasionalis yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme.

Isu politik dalam pemberitaan surat kabar banyak dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Beragam kebijakan pemerintah dikeluarkan untuk mendukung Golkar dalam setiap pemilihan, seperti Undang-undang Pemilu dan kepartaian. Hal ini dilakukan untuk mengontrol sepak terjang PDI dalam politik Orde Baru. Keberadaan birokrasi dan militer menjadi sarana efektif yang mendongkrak tujuan hegemoni pemerintah. Tujuan tersebut adalah untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto pada masa Orde Baru.

Saran

Saran yang bisa diajukan adalah perlunya meningkatkan independensi media massa, khususnya dalam pemberitaan politik. Selain melibatkan beberapa tokoh politik yang berpengaruh, pemberitaan ini berpengaruh pula pada pola pikir masyarakat tentang sistem politik di Indonesia. Kemudian, sehubungan dengan aktivitas kampanye, sebaiknya tidak hanya mengutamakan pengerahan massa, melainkan pendidikan politik. Selanjutnya adalah sikap pemerintah. Pemerintah harus mempunyai sikap tegas dalam menyikapi jalannya aktivitas kampanye. Begitu pula dengan peraturan yang ditetapkan, tidak memihak kepada organisasi sosial politik tertentu.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian sejarah pers, khususnya hubungan pers dengan organisasi sosial politik. Kajian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian yang menyoroti tentang sejarah politik Indonesia, sejarah politik Golkar, dan aktivitas kampanye politik di Indonesia. Selain itu, kajian ini dapat pula digunakan dalam pembelajaran sejarah, khususnya pada materi yang membahas mengenai sejarah nasional Indonesia pada masa Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Merdeka, 19 Maret 1982
Merdeka, 5 April 1982
Merdeka, 14 April 1987
Merdeka, 15 April 1982
Merdeka, 16 April 1982
Merdeka, 23 April 1977
Merdeka, 27 April 1982
Suara Karya, 18 Maret 1977
Suara Karya, 19 April 1977
Suara Karya, 19 Maret 1982
Suara Karya, 1 April 1982
Suara Karya, 8 April 1982
Suara Karya, 14 April 1982
Suara Karya, 15 April 1982
Suara Karya, 20 April 1982
Suara Karya, 27 April 1982
Suara Karya, 29 April 1982

Buku

Alex Sobur. 2009. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Aminuddin Kasdi. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press

Arbit Sanit. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Harsono Suwardi. 1993. *Peranan Pers Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Leo Suryadinata. 1992. *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES
- Louis Gotschalk. 1973. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Depok : UI
- Miriam budiardjo. 1994. *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Nezar Patria dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara daan Hegemoni*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Roger Simon. 1999. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist
- Rosady Roslan. 2005. *Kiat dan Strategi Kampanye: Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sadono, Bambang dkk. 1996. *Profil Pers Indonesia*. Semarang: PT. Djarum Kudus

